

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024. Variabel independen tersebut meliputi kepemilikan perusahaan yang diukur melalui kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik, tekanan *stakeholder* yang diukur melalui industri sensitif lingkungan dan industri dekat konsumen, serta variabel agresivitas pajak dan tekanan regulasi pemerintah. Berdasarkan pengujian terhadap variabel-variabel tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Rendahnya porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen belum cukup kuat untuk berperan aktif dalam menekan penyusunan dan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Investor institusional cenderung lebih memprioritaskan pada pencapaian kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan pengawasan terhadap transparansi informasi sosial dan lingkungan perusahaan.
3. Kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh pihak publik atau masyarakat luas, maka semakin tinggi tekanan perusahaan untuk bersikap transparan dalam pelaporan keberlanjutan. *Sustainability report* menjadi sarana perusahaan untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan pertanggung jawaban kepada publik.
4. Industri sensitif lingkungan berpengaruh terhadap *sustainability report*. perusahaan dengan aktivitas operasional yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi cenderung akan menyajikan laporan keberlanjutan secara lebih luas sebagai bentuk pertanggung jawaban akibat dampak yang ditimbulkan aktivitas operasional perusahaannya.

5. Industri dekat konsumen tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Industri yang berlokasi langsung dengan konsumen belum mampu mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan dikarenakan interaksi konsumen dengan perusahaan masih didominasi oleh transaksi komersial jangka pendek, sehingga isu keberlanjutan belum menjadi perhatian utama dalam sektor ini.
6. Agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan yang cenderung menekan pajaknya akan lebih aktif dalam menyajikan laporan keberlanjutan serta upaya ini juga dilakukan sebagai strategi untuk menjaga citra dan legitimasi perusahaan di mata publik.
7. Regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sejak diterbitkannya regulasi POJK No. 51 tahun 2017 menjadikan peraturan ini mengikat perusahaan untuk menerbitkan dan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Peraturan ini juga menjadi dasar dalam menjamin keterbukaan informasi non-keuangan dan untuk menjaga citra baik perusahaan dimata regulator.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditarik, maka untuk penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.

1. Bagi perusahaan, disarankan untuk meningkatkan peran manajerial melalui kebijakan internal, sehingga meskipun kepemilikan saham yang dimiliki relatif kecil tetapi aspek keberlanjutannya tetap diperhatikan.
2. Bagi perusahaan, perlu meningkatkan pengungkapan *sustainability report* dan peran investor institusional dalam aspek keberlanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan, untuk menjaga reputasi, dan menjaga stabilitas kinerja keuangan di masa depan.
3. Bagi perusahaan disarankan untuk tetap konsisten dan transparan dalam menyusun dan mengungkapkan *sustainability report*, karena tekanan publik mendorong perusahaan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan legitimasi serta meningkatkan kepercayaan publik.
4. Bagi perusahaan di industri sensitif lingkungan disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan transparansi mengenai aktivitas

operasional perusahaannya dalam bentuk *sustainability report* sebagai bentuk nyata tanggung jawab dan menghindari potensi penolakan dari masyarakat.

5. Bagi perusahaan di industri dekat konsumen disarankan menginformasikan aktivitas keberlanjutan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadikan aspek keberlanjutan sebagai nilai tambah bagi perusahaan.
6. Bagi perusahaan, disarankan untuk menyeimbangkan strategi perpajakan dengan transparansi keberlanjutan agar pengungkapan mencerminkan komitmen tanggung jawab sosial, bukan sekadar mengurangi risiko reputasi akibat praktik pajak agresif.
7. Bagi perusahaan, disarankan tidak hanya menjadikan POJK No. 51 Tahun 2017 sebagai kepatuhan administratif saja, tetapi menjadikannya sebagai standar minimum untuk meningkatkan kualitas pengungkapan *sustainability report* agar kepatuhan tersebut mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik di mata regulator dan pemangku kepentingan.

